

**DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK**

***DETERMINANTS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN  
BALONGPANGGANG DISTRICT, GRESIK REGENCY***

**Vanny Lellyta Indah Novita Sriwulandari<sup>1</sup>, Siti Sundari<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur<sup>1,2</sup>

[19013010028@student.upnjatim.ac.id](mailto:19013010028@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [sitisundari.ak@upnjatim.ac.id](mailto:sitisundari.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The accountability of village fund management plays an important role in developing a village. The purpose of this study was to test and prove the effect of village apparatus competence, internal control system, information technology utilization, and community participation on the accountability of village fund management in Balongpanggung District, Gresik Regency. This research was conducted in Balongpanggung District, Gresik Regency, totaling 25 villages. The sample was taken using purposive sampling technique and obtained as many as 150 respondents who had criteria, including village officials who knew about the accountability of village fund management consisting of the village head, village secretary, finance head, planning head, Kasi Kesra, and the Village Consultative Body (BPD). Data collection techniques using primary data sourced from questionnaires. The analysis technique used was SEM-PLS. The results showed that the competence of village officials, technology utilization, and community participation had an effect on the accountability of village fund management in Balongpanggung District, Gresik Regency, while the internal control system had no effect on the accountability of village fund management in Balongpanggung District, Gresik Regency.*

**Keywords:** *Community Participation, Internal Control System, Utilization of Information Technology, Village Apparatus Competence, Village Fund Management Accountability.*

**ABSTRAK**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan penting dalam membangun suatu desa. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik yang berjumlah 25 desa. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* dan didapatkan sebanyak 150 responden yang memiliki kriteria, antara lain aparatur desa yang mengetahui mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasi kesra, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal.

## PENDAHULUAN

Indonesia membutuhkan banyak sekali pembangunan untuk menjadi negara berkembang, salah satu yang dilakukan pemerintah yaitu mengembangkan desa menjadi lebih maju yang disesuaikan dengan potensi dari desa tersebut (Pahlawan dkk., 2020). Unsur penyelenggara pengelolaan dana desa dalam pemerintah desa ialah kepala desa dan aparatur desa lainnya. Pembangunan dan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>,

menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sumber daya keuangan yang besar diperlukan untuk memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga dengan program penyaluran dana desa dibutuhkannya sebuah peraturan mengenai pengelolaan anggaran dana desa agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Kabupaten Gresik memiliki banyak kecamatan, salah satunya Kecamatan Balongpanggang. Berdasarkan wawancara beberapa kepala desa di kecamatan Balongpanggang pada tanggal 11 Januari 2023, menyatakan bahwa anggaran dana setiap desa cukup beragam. Hal ini diperkuat oleh Kepala desa Brangkal Bapak Dodik Setiawan yang mengatakan bahwa keberagaman anggaran dana desa dipengaruhi oleh kelincahan kepala desa tersebut dalam mencari dana untuk menjadi desa yang lebih maju. Berdasarkan wawancara Bapak Nurul Muchid selaku Sekretaris kecamatan Balongpanggang pada

tanggal 11 Januari 2023 mengatakan bahwa dalam penerapan prinsip akuntabilitas di desa yang berada di wilayah kecamatan Balongpanggang masih belum maksimal. Hal ini sejalan dengan Kepala desa Brangkal Bapak Dodik Setiawan menyatakan bahwa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas sering terjadi perubahan secara mendadak dari Peraturan Presiden serta surat edaran Bupati yang mengakibatkan para aparatur desa harus merekap ulang serta menghitung kembali agar pagu anggaran bisa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga akuntabilitas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pengelolaan dana desa rentan terjadinya korupsi, seperti yang dinyatakan dalam ICW (*Indonesia Corruption Watch*) bahwa terdapat 154 kasus pada 2021 yang ada disektor anggaran dana desa dengan potensi kerugian sebesar Rp. 233 miliar (Anandya dkk., 2022). Semakin besar anggaran dana desa tersebut maka semakin rentan terjadi penyelewengan maupun kecurangan lainnya, sehingga prinsip akuntabilitas atas pengelolaan dana desa penting untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. (Fathia & Indriani, 2022).

Pengelolaan anggaran dana desa yang besar membutuhkan adanya beberapa faktor, yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar tidak terjadi penyelewengan dan dana desa tersebut tepat sasaran (Pahlawan dkk., 2020). Sebagai akibat dari aparatur desa yang kompeten menangani keuangan desa, pengelolaan dana desa yang baik dan bertanggung jawab juga bergantung pada kompetensi aparatur desa (Dewi & Gayatri, 2019). Hal ini relevan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Riski & Maryono (2020) mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafadhila & Yuliasuti (2021) yang mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Mengingat besarnya dana yang disalurkan dan perlunya kepercayaan dalam pencapaian tujuan pelaporan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mualifu dkk., 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Nafsiah & Diana (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi dapat mengeliminasi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data dan mempermudah aparat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Teknologi informasi memiliki keunggulan dalam ketepatan dan keakuratan hasil operasi data (Sarah Siti dkk. 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andika & wati, (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi bertentangan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Riyadi & Kurnadi (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan program-program desa dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana mencapai tujuan bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin akuntabel desa dalam pengelolaan dana desanya (Valentinus dkk., 2021). Sebagaimana dikemukakan oleh Ridha dkk. (2021) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian Nafadhila & Yuliasuti (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sebagaimana uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan yang sekarang yaitu terletak pada objek penelitian, alat uji, dan tahun penelitian. Penelitian sekarang dilakukan di 25 desa yang ada di wilayah Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik pada tahun 2023 dengan menggunakan alat uji yaitu *SmartPLS*.

## KAJIAN TEORI

### Teori *Stewardship*

Donaldson & Davis (dalam Sari Rita & Padnyawati, 2021) menjelaskan bahwa teori *stewardship* adalah menggambarkan kondisi manajemen tidak didorong oleh tujuan pribadi, namun memiliki tujuan dan sasaran yang

ditujukan untuk kepentingan organisasi. Sementara itu, Jatmiko (2020) mengartikan teori *Stewardship* sebagai suatu keadaan dimana manajer bertindak sebagai *stewars* dan fokus pada tujuan organisasi dan kepentingan bersama daripada keinginan pribadi. Vitta & Damayanti (2022) mengemukakan bahwa teori *stewardship* merupakan tujuan yang harus dicapai pemerintah saat menjalankan tanggungjawabnya, selain itu pemerintah melakukan pekerjaan tersebut untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi.

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Mardiasmo (2018) mengartikan bahwa akuntabilitas ialah tanggung jawab untuk melaporkan dan menjelaskan apakah suatu organisasi berhasil atau gagal dalam menggunakan media demi mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai untuk dipertanggungjawabkan secara berkala. Supadmi & Dharma (2018) mengartikan akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Ini dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan prosedur, aturan, dan peraturan yang berlaku. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Mada, 2017).

#### **Kompetensi Aparatur desa**

Hutapea & Thoha (dalam Moehariono, 2018) mengemukakan kompetensi merupakan tekad serta keahlian untuk melakukan tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi sesuai kemampuan yang realistis dan praktis. Sementara itu, Spencer (dalam Moehariono, 2018) mengungkapkan jika kompetensi adalah karakteristik yang menjadi awal seseorang berhubungan dengan keberhasilan kinerja seseorang di

tempat kerjanya untuk dijadikan sebagai sebab akibat yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk berkinerja secara optimal dalam kondisi kerja tertentu.

Sebagai pengelola keuangan desa, kompetensi aparatur sangat penting karena akan memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat (Nur dkk., 2019). Kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa akan membantu mencapai tujuan pemerintah dan mengelola dana desa dengan lebih mudah. Teori *stewardship* menjelaskan di mana aparatur pemerintah desa berfungsi sebagai *steward* bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan desa dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tugasnya. Indikator kompetensi aparatur desa terdiri atas pemahaman, inisiatif dalam bekerja, pelatihan, keahlian teknis, dan kode etik kepegawaian (Perdana, 2018).

#### **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>, Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Mahmudi (2010) mengemukakan sistem pengendalian internal sebagai prosedur keseluruhan yang berasal dari kegiatan manajemen yang mendukung pemenuhan tujuan organisasi melalui tindakan yang efisien dan efektif, kepercayaan pada laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan, pengamanan aset negara, dan keandalan laporan keuangan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan elemen yang sangat penting karena dapat mempengaruhi prosedur pengambilan keputusan internal pemerintah desa, yang berdampak pada akuntabilitas dan transparansi (Mualifuddin, 2019). Hal ini sesuai dengan teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa pemerintah desa, sebagai pelayanan publik, harus menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai principal dalam mengelola dana desa untuk mencapai tujuan. Indikator sistem pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal.

#### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Juhriyansyah dkk. (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, yaitu mengubah, menyimpan, menyusun, mendapatkan, dan memprosesnya dengan berbagai cara untuk menghasilkan data berkualitas tinggi. Nur dkk. (2019) mendefinisikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat yang dapat membantu aparatur pengelola dana desa dalam melaksanakan pekerjaannya serta dapat menghasilkan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah desa dapat menggunakan teknologi informasi untuk menangani data yang berkaitan dengan dana desa dengan lebih baik dan mengurangi kesalahan pengelolaan data, sehingga pemerintah dapat secara cepat dan tepat melaporkan manajemen dana desa. (Nafadhila & Yuliasuti, 2021). Sesuai dengan teori *stewardship*,

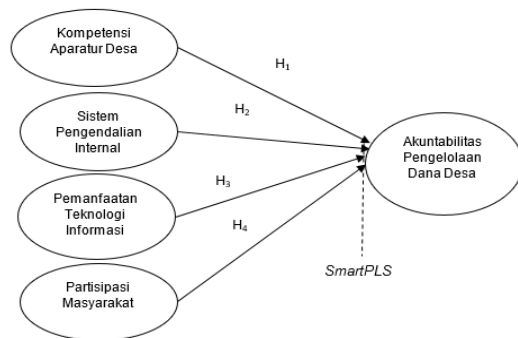
pemerintah desa diharuskan untuk menyajikan dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pemilik dana, dan dapat menggunakannya untuk membuat keputusan. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pekerjaannya karena mereka bertanggung jawab kepada masyarakat. Indikator pemanfaatan teknologi informasi yaitu sarana prasarana, sasaran, dan pemeliharaan (Widiyanta, 2017).

#### **Partisipasi Masyarakat**

Putra & Rasmini (2019) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu peran masyarakat dalam suatu kegiatan pemerintahan yang dapat membantu pemerintahan dalam menjalankan suatu kinerja pemerintah. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi cenderung berkorelasi positif dengan efektivitas pengelolaan dana desa. Tujuan utama partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, terutama dalam proses pengambilan keputusan mengenai program pembangunan desa dan tujuan bersama agar bisa terealisasi (Pahlevi dkk., 2022).

Teori *stewardship* Mengimplementasikan bahwa suatu organisasi bukan hanya mementingkan individu melainkan untuk kepentingan bersama. Sehingga pemerintah desa dengan masyarakat memiliki hubungan dalam mewujudkan terlaksananya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan desa sangat penting karena mereka dapat mengetahui tentang dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan prioritas pelaksanaan

pembangunan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, efektif, dan efisien (Zulfa & Septiviastuti, 2019), sehingga pemerintah desa membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk melaporkan pertanggungjawaban desa. Indikator partisipasi masyarakat meliputi pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran (Mada, 2017).



Gambar 1 Kerangka Konseptual  
Sumber: Peneliti (2023)

### Hipotesis

- H<sub>1</sub>: Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
- H<sub>2</sub>: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
- H<sub>3</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
- H<sub>4</sub>: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel dependen dari penelitian ini ialah akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara

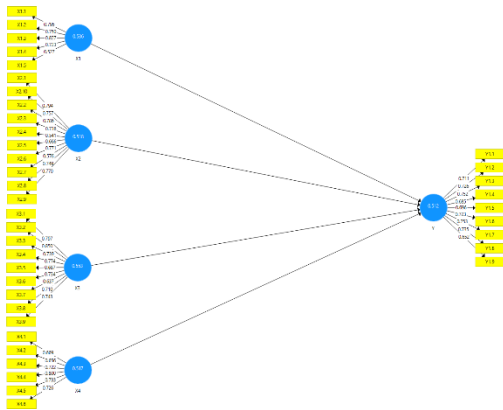
variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Populasi yang dipilih ialah semua desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang berjumlah 25 desa. Sampel diambil menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel didapatkan sebanyak 150 responden yang diambil dari 25 desa dan setiap desa diambil 6 aparatur desa dengan kriteria yaitu aparatur desa yang mengetahui mengenai pengelolaan dana desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala seksi kesejahteraan masyarakat, dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner. Penelitian ini menggunakan skala ukur variabel berupa skala ordinal dengan teknik skala likert. Teknik analisis berupa *SEM-PLS*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Outer Model

##### Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen bertujuan untuk menilai seberapa akurat hubungan antara variabel. Validitas konvergen diselesaikan melalui analisis nilai outer loading untuk masing-masing indikator variabel laten. Suatu indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai outer loading > 0,7, namun apabila nilai outer loading > 0,5-0,6 dianggap masih cukup memadai (Duryadi, 2021). Validitas konvergen juga dapat dinilai melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan 0,5 sebagai batas minimalnya.



Gambar 2 Outer Loading dan AVE  
 Sumber: *Output SmartPLS* (2023)

Berdasarkan pengelolaan data diperoleh hasil uji validitas konvergen bahwa semua indikator memiliki nilai

outer loading > 0,5 dan AVE > 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi kriteria pengukuran sehingga dikatakan valid.

Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan terpenuhi apabila nilai *cross loading* memiliki diskriminan yang memadai yang ditentukan dengan membandingkan nilai loading konstruk yang dituju harus lebih besar daripada nilai loading konstruk lainnya.

Tabel 1 *Cross Loading*

	Kompetensi Aparatur Desa  (X1)	Sistem Pengendalian Internal  (X2)	Pemanfaatan Teknologi Informasi  (X3)	Partisipasi Masyarakat  (X4)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  (Y)
X1.1	<b>0.795</b>	0.212	0.361	0.103	0.306
X1.2	<b>0.750</b>	0.219	0.412	0.121	0.288
X1.3	<b>0.827</b>	0.322	0.389	0.200	0.350
X1.4	<b>0.723</b>	0.120	0.202	0.223	0.329
X1.5	<b>0.527</b>	0.053	0.051	0.225	0.239
X2.1	0.194	<b>0.794</b>	0.309	0.144	0.213
X2.2	0.250	<b>0.757</b>	0.239	0.040	0.049
X2.10	0.231	<b>0.786</b>	0.261	0.207	0.169
X2.3	0.106	<b>0.736</b>	0.132	0.153	0.254
X2.4	0.111	<b>0.541</b>	0.160	0.067	0.140
X2.5	0.190	<b>0.666</b>	0.182	0.092	0.150
X2.6	0.296	<b>0.771</b>	0.219	0.095	0.237
X2.7	0.192	<b>0.576</b>	0.205	0.162	-0.005
X2.8	0.221	<b>0.749</b>	0.235	0.002	0.025
X2.9	0.281	<b>0.770</b>	0.275	0.078	0.162
X3.1	0.235	0.266	<b>0.797</b>	0.029	0.283
X3.2	0.361	0.241	<b>0.850</b>	0.021	0.231
X3.3	0.239	0.210	<b>0.739</b>	-0.030	0.134
X3.4	0.322	0.214	<b>0.774</b>	0.041	0.241
X3.5	0.294	0.244	<b>0.687</b>	0.083	0.227
X3.6	0.321	0.279	<b>0.734</b>	-0.016	0.168
X3.7	0.399	0.167	<b>0.637</b>	0.007	0.303
X3.8	0.229	0.176	<b>0.710</b>	0.023	0.208

X3.9	0.207	0.202	0.743	0.154	0.210
X4.1	0.155	0.138	0.044	0.669	0.233
X4.2	0.200	0.072	0.079	0.656	0.165
X4.3	0.228	0.135	0.034	0.722	0.174
X4.4	0.119	0.107	0.019	0.800	0.188
X4.5	0.119	0.098	-0.047	0.733	0.124
X4.6	0.192	0.124	0.069	0.726	0.146
Y1.1	0.185	0.123	0.228	0.139	0.711
Y1.2	0.189	0.133	0.176	0.173	0.726
Y1.3	0.355	0.075	0.263	0.141	0.752
Y1.4	0.342	0.296	0.256	0.105	0.685
Y1.5	0.440	0.216	0.224	0.106	0.696
Y1.6	0.387	0.235	0.191	0.302	0.723
Y1.7	0.280	0.259	0.267	0.235	0.753
Y1.8	0.193	0.135	0.239	0.195	0.735
Y1.9	0.108	0.083	0.153	0.200	0.652

Sumber: *Output SmartPLS* (2023)

Berdasarkan hasil pengelolaan data bahwa semua nilai loading konstruk yang dituju lebih besar daripada nilai loading konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa validitas diskriminasi dinyatakan terpenuhi.

#### Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas data dalam penulisan ini melalui *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Konstruk dikatakan reliabilitas yang tinggi jika memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,6 dan *Composite Reliability* > 0,7 (Duryadi, 2021). Berikut nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* pada penelitian ini:

Tabel 2 Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0.775	0.850
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0.904	0.914
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0.898	0.917
Partisipasi Masyarakat (X4)	0.815	0.865
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.883	0.904

Sumber: *Output SmartPLS* (2023)

Berdasarkan tabel 2 bahwa hasil pengujian masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach's Alpha* > 0,6 dan *composite Reliability* > 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

#### Inner Model

##### Uji R-Squares ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinan *R-Squares* digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan mengelompokkan nilai  $R^2$  ke dalam kategori kuat dengan nilai 0,67, moderat dengan nilai 0,33 dan lemah jika nilai 0,19 (Duryadi, 2021).



Tabel 3 Nilai *R-Square* ( $R^2$ )

	<i>R-Square</i> ( $R^2$ )
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.600

Sumber: *Output SmartPLS* (2023)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai  $R^2$  masuk ke dalam kategori moderat yaitu sebesar 0,600 menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat di dalam menjelaskan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 60%. Sedangkan, sisanya sebesar 40% dijelaskan oleh variabel-variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### Uji *Q-square* ( $Q^2$ )

Nilai pada  $Q^2$  berguna untuk validasi kemampuan prediksi model. Nilai  $Q^2 > 0$  menunjukkan bahwa model

mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan nilai  $Q^2 < 0$  menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Berikut hasil dari pengukuran  $Q^2$ :

Tabel 4 Nilai *Q-Square* ( $Q^2$ )

	<i>Q-Square</i> ( $Q^2$ )
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.205

Sumber: *Output SmartPLS* (2023)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai  $Q^2$  sebesar 0,205 yang berarti bahwa model pada penelitian ini memiliki nilai *predictive relevance* yang baik, sehingga kemampuan prediksi model variabel independen seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat telah sesuai dan dapat memprediksi dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### Uji hipotesis

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T statistic ( O/STDEV )	P value
Kompetensi Aparatur Desa (X1) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,288	3,137	<b>0,002</b>
Sistem Pengendalian Internal (X2) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,111	<b>1,005</b>	<b>0,315</b>
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,160	2,036	<b>0,044</b>
Partisipasi Masyarakat (X4) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,156	1,988	<b>0,047</b>

Sumber : *Output SmartPLS* (2023)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil uji hipotesis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai original sample

kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,288, nilai t-statistik sebesar 3,137 dan nilai p-value sebesar 0,002. Karena nilai p-value  $< 0,05$  sehingga hipotesis yang menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik **dapat diterima.**

2. Sistem pengendalian internal berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai original sample sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,111, nilai t-statistik sebesar 1,005 dan nilai p-value sebesar 0,315. Karena Karena nilai p-value > 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik **ditolak.**
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai original sample pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,160, nilai t-statistik sebesar 2,016 dan nilai p-value sebesar 0,044. Karena nilai p-value < 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik **dapat diterima.**
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai original sample partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,156, nilai t-statistik sebesar 1,988 dan nilai p-value sebesar 0,047. Karena nilai p-value < 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik **dapat diterima.**

### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* dijelaskan bahwa aparatur desa sebagai *steward*. Peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa perlu dilakukan. Sebagai pengelola dana desa, kompetensi aparatur desa menjadi sangat penting karena kompetensi tersebut akan mempengaruhi akuntabilitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan (Nur dkk., 2019). Aparatur desa yang berkompeten tentunya dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik sehingga aparatur desa akan dipercaya oleh masyarakat maupun pemerintah desa karena dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019) dan Riski & Maryono (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal

tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya jumlah tim pengendalian internal dalam lingkup pemerintahan desa dan pertanggungjawaban pemerintah desa yang kurang maksimal terhadap laporan keuangan desa. Selain itu sistem pengendalian internal menjadi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dapat dikarenakan tim pengendalian internal dari aparatur desa dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang laporan keuangan sehingga berakibat pada pengendalian dana masih dilakukan secara sederhana (Pahlawan dkk., 2020). Sistem pengendalian yang kurang maksimal dapat ditingkatkan dengan adanya komitmen dan tanggung jawab yang baik pada pengendalian internal dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa akan membaik. Selain itu dapat dilakukan dengan (Sumantri, 2019) ditingkatkannya lingkungan pendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliasuti & Riharjo (2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas**

#### **Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan membantu para aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mencari dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat (Pahlawan dkk., 2020), sehingga pemanfaatan teknologi membantu para aparatur desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan mudah. Sebagaimana yang dikemukakan Teori *stewardship* didasarkan untuk membentuk mekanisme pertanggungjawaban dari organisasi agar selalu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal, tepat, dan efisien untuk kepentingan publik dan instansi (Febrianti & Yuhertiana, 2021). Pemerintah desa dituntut untuk menyajikan dan menyediakan segala informasi yang dibutuhkan oleh pemilik dana sebagai pengguna informasi dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andika & wati, (2021), Nafadhila & Yuliasuti (2021), dan Adelia A. & Harahap W. (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan**

## Dana Desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung akan mempengaruhi seberapa baik aparatur desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan memiliki tujuan untuk membantu mengambil keputusan dan memastikan bahwa program pembangunan desa dan tujuan dapat terealisasi (Pahlevi dkk., 2022). Dengan hal tersebut keikutsertaan masyarakat dalam lingkup desa yang sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, masyarakat desa berhak memberikan usul dan saran kepada kepala desa melalui Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridha dkk. (2021), Umaira & Adnan, (2019), dan Sarah Siti dkk., (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Sedangkan, Sistem pengendalian internal tidak berkontribusi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Saran bagi penelitian yang akan datang dapat menggunakan berbagai macam

variabel lain seperti aksebilitas laporan keuangan yang ada hubungannya dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dan yang jarang diteliti. Penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu adanya perbedaan persepsi antar masing-masing responden dalam memahami konteks pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan peneliti. Kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dirasakan responden pada saat pengisian kuesioner sehingga dapat mempengaruhi jawaban responden yang memungkinkan jawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia A., & Harahap W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen, Vol. 2 No.1*, 156–167.  
<http://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/258/178>
- Anandya, D., Ramadhana, K., & Easter, L. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Andika, & wati. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, Vol.2 No. 4*, 340–350.  
<https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2023>
- Arfiansyah, A., Tinggi, S., Islam, A., Astuti, M., & Pendahuluan, W. (2020). *Journal of Islamic Finance and Accounting Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

- Terha-dap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 10 No.1, 14–25. <https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.182>
- Duryadi. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah. Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS*. Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi Di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *National Conference On Accounting And Finance*, Vol. 4, 455–468. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Febrianti, T., & Yuhertiana, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 137–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 7 No. 2, 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Juhriyansyah Dalle, A. Akrim, & Baharuddin. (2020). *Pengantar Teknologi Informasi* (RGP, Ed.; Cetakan 1). Rajawali Printing.
- Mada. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, Vol. 8 No. 2, 106–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Moheriono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Rajagrafindo Persada.
- Mualifu, Guspul, & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, Vol. 1 No. 1, 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.875>
- Nafadhila, & Yuliastuti. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

- Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 10 NO. 4, 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866/3877>
- Nur, M., Sawitri, A., & Prastiti, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi Aktual* (Vol. 6, Issue 2).
- Pahlawan, E., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, Vol. 2 No. 2, 162–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pahlevi, M., Susilowati, E., & Widoretno, A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5 No. 3, 1480–1486. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2572>
- Perdana. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Deesa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Ridha, Agusti, & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 17 No. 2, 209–227. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Riski, & Maryono. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Komputererisasi Akuntansi*, Vol. 13 No. 1, 122–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.624>
- Riyadi, & Kurnadi. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol. 3 No. 2, 160–168. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31949/mr.v3i2.2438>
- Sarah Siti, Taufik Taufeni, & Safitri Devi. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No. 4, 330–341. <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/717/562>
- Sari Rita, & Padnyawati. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

- Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 2 No. 2, 544–562. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32795/hak.v2i2.1571>
- Sumantri, I. (2019). Peran Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 13 No. 2(2), 196–224. <https://doi.org/10.25170/jara.v13i2>
- Supadmi, N. L., & Dharma, S. D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, Vol. 13 No. 2, 132–145. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>
- Umaira, & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipas Masyarakat, kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 4 No. 3, 471–481. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/12580/5119>
- Vitta, & Damayanti. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5 No. 2, 134–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.36815/prive.v5i2.2087>
- Widiyanta. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Perspektif Pegawai Atas Kinerja Pemerintah Dengan Pendekatan Value For Money Pada SKPD Kulon Progo (Survey Pada SKPD Kabupaten Kulon Progo DIY)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Williams, & Sawyer. (2007). *Pengenalan Praktis Dunia Komputer dan Komunikasi*. ANDI.
- Yuliasuti, & Riharjo. (2020). Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal, Dan Kejelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No. 10, 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3688/3703>
- Zulfa Wafirotn, K., & Septiviasuti, U. (2019). The Effect Of Transparency, Community Participation, And Accountability On Management Of Village Funds In Ponorogo Regency. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 14 No. 1, 31–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v14i1.%25y.pp31-43>